

ABSTRAK

M. RAYEN AKBAR

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana umum (KUHP). Tindak pidana narkotika dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat memicu timbulnya dampak negatif yang amat besar terhadap segala aspek kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun.

Permasalahannya adalah aturan tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim atas tindakan perantara penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan Pengedaran gelap narkoba bukan saja melanggar perundang-undangan nasional masing-masing negara yang bersangkutan, tetapi juga melanggar berbagai perjanjian dan konvensi Internasional. Pengedaran gelap narkoba melibatkan berbagai tindak kejahatan lainnya seperti penyuapan pejabat negara, elit politik, pejabat pemerintahan, jajaran penegak hukum persekongkolan jahat, narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi sindikat narkoba yang tertangkap, Pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau pemufakatan jahat. Pertimbangan hakim atas tindakan kekerasan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021 Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemufakatan Narkotika.

ABSTRACT

M. RAYEN AKBAR

Narcotics crime is a crime that is included in the realm of special criminal law. Special criminal law is part of criminal law which is regulated in a separate law outside the general criminal law (KUHP). Narcotics crime can also be categorized as an extraordinary crime because it can trigger a very large negative impact on all aspects of life both in the social, cultural, economic, even political fields.

The problem is the rules for conspiratorial acts in narcotics abuse in statutory regulations, criminal responsibility for conspiratorial acts in narcotics abuse in statutory regulations and judges' considerations for intermediary acts of narcotics abuse in Supreme Court Decision Number 3424 K/Pid.Sus/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the rules for conspiracy to commit crimes in narcotics abuse in the laws and regulations on illicit drug trafficking not only violate the national legislation of each country concerned, but also violate various international treaties and conventions. Drug trafficking involves various other crimes such as bribery of state officials, political elites, government officials, criminal conspiracy law enforcers, free drugs operate in a country, so several countries have implemented severe legal sanctions for drug syndicates caught, criminal responsibility for the act of conspiracy in the abuse of narcotics in statutory regulations. The conspiracy is only a preparatory act (*voorbereidingshandelingen*). In practice, there are still many law enforcement officers in Indonesia who apply Article 132 paragraph (1) to attempt or conspiracy. The judge's consideration of acts of violence against children in the decision of the Supreme Court Number 3021 K/Pid.Sus/2021 Based on the considerations above, it turns out that *Judex Facti's* decision in this case does not conflict with the law and/or the law, so the cassation request declared rejected, that because the Defendant was convicted, he was burdened to pay court costs at the cassation level.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics Consensus.